

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin**Volume 2, Nomor 12, Desember 2024, P. 943-951****Licensed By Cc By-Sa 4.0****E-ISSN: 2986-6340****DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14583766>**

Konsumsi, Tabungan, dan Investasi Dalam Syariah Makro Ekonomi

Leny Julika¹, Siti Aisyah Adelina², Muhammad Albahi³^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riaue-mail: Lenyjulika31@gmail.com, sitiaisyahadelina@uin-suska.ac.id, Muhammadalbahi@yahoo.co.id

Abstract

Islamic economics integrates Sharia principles into economic activities, emphasizing a balance between material and spiritual needs to achieve collective welfare. This study aims to explore how national income, exports, and imports are viewed in Islamic economics, contrasting with conventional economics that prioritizes wealth accumulation and efficiency. In Islamic economics, national income considers not only material value but also equitable wealth distribution to prevent social inequality. Exports and imports are seen as instruments for both economic and social benefit, including da'wah (spiritual outreach). The results indicate that Islamic economics prioritizes justice, halal standards, and sustainability in international trade, with the government playing a crucial role in aligning policies with Sharia principles.

Keywords: Islamic Economics, National Income, Export, Import, Sharia, Sustainability.

Abstrak

Ekonomi Islam menggabungkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi dengan menekankan keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual untuk mencapai kesejahteraan bersama. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana konsep pendapatan nasional, ekspor, dan impor dipandang dalam ekonomi Islam, yang berbeda dari ekonomi konvensional yang lebih menitikberatkan pada akumulasi kekayaan dan efisiensi. Dalam ekonomi Islam, pendapatan nasional tidak hanya dilihat dari segi materi, tetapi juga memperhatikan distribusi kekayaan yang adil untuk mencegah ketimpangan sosial. Ekspor dan impor juga dipandang sebagai instrumen yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, melainkan juga pada manfaat sosial dan dakwah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekonomi Islam memprioritaskan keadilan, kehalalan, dan keberlanjutan dalam perdagangan internasional, dengan pemerintah memiliki peran penting dalam mengatur kebijakan agar sejalan dengan prinsip syariah.

Kata Kunci: Ekonomi Islam, Pendapatan Nasional, Ekspor, Impor, Syariah, Keberlanjutan.

Article Info

Received Date: 27 November 2024

Revised Date: 15 December 2024

Accepted Date: 29 December 2024

PENDAHULUAN

Ekonomi Islam merupakan disiplin ilmu yang menggabungkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah dalam praktik ekonomi sehari-hari. Sistem ini berbeda dengan ekonomi konvensional yang berfokus pada akumulasi kekayaan dan pencapaian keuntungan maksimal tanpa memperhatikan aspek moral atau kesejahteraan sosial. Ekonomi Islam mengedepankan keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual, dengan menitikberatkan pada keadilan, kesejahteraan, serta keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya. Prinsip-prinsip ini tidak hanya berlaku dalam konteks konsumsi dan produksi, tetapi juga dalam hal pendapatan nasional, ekspor, dan impor yang menjadi pilar utama ekonomi makro.

Pendapatan nasional adalah ukuran penting yang digunakan untuk menilai kinerja ekonomi suatu negara. Dalam ekonomi konvensional, pendapatan nasional biasanya dihitung melalui produk domestik bruto (PDB) atau produk nasional bruto (PNB) yang mencerminkan total nilai produksi barang dan jasa dalam suatu periode tertentu. Namun, dalam ekonomi Islam, pendapatan nasional tidak hanya dilihat dari segi materi, tetapi juga melibatkan aspek spiritual dan etika. Pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam tidak hanya mencerminkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga bagaimana pertumbuhan tersebut didistribusikan secara adil di antara semua lapisan masyarakat. Islam menekankan pentingnya keadilan sosial dan pemerataan kekayaan, yang bertujuan untuk mencegah penumpukan kekayaan pada sekelompok kecil masyarakat. Oleh karena itu, pendapatan nasional dalam ekonomi Islam lebih dari sekadar angka statistik; ia harus mencerminkan kesejahteraan sosial dan mendukung masalah (kemaslahatan umum).

Distribusi pendapatan nasional dalam ekonomi Islam tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar individu, tetapi juga untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Islam mengajarkan bahwa individu memiliki tanggung jawab untuk menggunakan kekayaan yang mereka peroleh untuk kemanfaatan orang lain, terutama melalui instrumen seperti zakat, infak, dan sedekah. Instrumen-instrumen ini bertindak sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan memberikan kesempatan bagi mereka yang kurang beruntung untuk turut menikmati hasil dari pendapatan nasional. Pada tingkat makro, pendapatan nasional dalam ekonomi Islam harus dikelola dengan cara yang tidak hanya memperkaya negara, tetapi juga memberikan manfaat bagi seluruh rakyat. Prinsip distribusi pendapatan ini didasarkan pada keadilan (*al-adl*) dan kepedulian terhadap masyarakat (*al-ihsan*). Dalam Al-Qur'an, Allah memerintahkan agar kekayaan tidak beredar hanya di antara orang-orang kaya saja, tetapi juga mencapai masyarakat yang lebih luas, sehingga kesejahteraan dapat dirasakan oleh semua lapisan.

Ekspor merupakan salah satu komponen penting dalam perekonomian suatu negara, termasuk dalam ekonomi Islam. Ekspor tidak hanya membantu negara memperoleh devisa dan meningkatkan pendapatan nasional, tetapi juga berperan dalam memperkenalkan produk-produk halal ke pasar global. Dalam ekonomi Islam, ekspor diharapkan dapat memberikan manfaat bukan hanya dalam bentuk keuntungan ekonomi, tetapi juga sebagai media dakwah yang memperkenalkan nilai-nilai Islam, seperti kehalalan, keadilan, dan keberlanjutan. Produk yang diekspor harus memenuhi standar halal yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini berarti produk yang diekspor tidak boleh mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, seperti alkohol, daging babi, atau produk yang diperoleh melalui praktik-praktik yang melanggar etika, seperti eksploitasi buruh. Selain itu, produk yang diekspor juga diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal, dengan cara menciptakan lapangan kerja, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, dan mendorong perkembangan industri lokal.

Ekonomi Islam memandang ekspor sebagai bagian dari perdagangan internasional yang harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah. Prinsip utama dalam ekspor adalah kehalalan, transparansi, dan keadilan. Kehalalan berarti produk yang diekspor harus bebas dari unsur-unsur yang diharamkan dalam Islam. Transparansi menuntut adanya keterbukaan dalam proses perdagangan, termasuk informasi tentang kualitas, harga, dan asal produk. Keadilan berarti perdagangan harus dilakukan tanpa ada pihak yang dirugikan, baik dari sisi produsen, konsumen, maupun pihak ketiga yang terkait dalam transaksi tersebut. Prinsip lain yang harus diperhatikan dalam ekspor adalah manfaat sosial dari produk tersebut. Produk yang diekspor sebaiknya memiliki nilai tambah bagi masyarakat di negara asal dan negara tujuan. Ekspor yang hanya berorientasi pada keuntungan finansial tanpa mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam yang mengedepankan masalah atau kemaslahatan umum.

Selain ekspor, impor juga memegang peranan penting dalam ekonomi Islam, terutama dalam memenuhi kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi melalui produksi domestik. Namun, dalam ekonomi Islam, impor harus dilakukan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap ekonomi lokal. Islam mengajarkan agar umat Islam mengutamakan produk lokal selama produk tersebut memenuhi kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan prinsip syariah. Impor sebaiknya dilakukan hanya untuk barang-barang yang benar-benar dibutuhkan, bukan untuk barang-barang mewah yang dapat mendorong budaya konsumtif dan bertentangan dengan prinsip kesederhanaan dalam Islam. Barang-barang yang diimpor harus bebas dari unsur-unsur yang diharamkan, seperti alkohol, daging babi, atau produk yang mengandung unsur riba. Selain itu, impor juga harus memperhatikan aspek keberlanjutan dan dampaknya terhadap lingkungan. Islam mengajarkan pentingnya menjaga alam sebagai amanah dari Allah, sehingga produk yang diimpor haruslah produk yang tidak merusak lingkungan atau menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat.

Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam mengelola ekspor dan impor agar sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Salah satu tugas utama pemerintah adalah memastikan bahwa barang-barang yang diekspor dan diimpor memenuhi standar halal dan tidak bertentangan dengan syariah. Pemerintah juga harus menerapkan kebijakan yang mendukung industri lokal agar mampu bersaing di pasar internasional dan mengurangi ketergantungan pada impor. Selain itu, pemerintah juga bertanggung jawab untuk melindungi kepentingan konsumen melalui regulasi yang memastikan produk yang diimpor aman, halal, dan berkualitas. Dalam konteks ekspor, pemerintah perlu mengembangkan kerjasama dengan negara-negara lain untuk membuka akses pasar bagi produk halal dari negara asal. Hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan adil, sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Ekonomi konvensional umumnya memandang pendapatan nasional, ekspor, dan impor dari sudut pandang utilitas dan efisiensi. Pendapatan nasional diukur berdasarkan peningkatan PDB atau PNB tanpa memperhatikan distribusi kekayaan atau kesejahteraan sosial. Ekspor dan impor dilakukan semata-mata untuk meningkatkan devisa dan memenuhi kebutuhan pasar, tanpa memperhatikan aspek kehalalan atau dampak sosial dari barang-barang yang diperdagangkan. Sebaliknya, ekonomi Islam memandang pendapatan nasional sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat. Ekspor dan impor tidak hanya dilakukan untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara yang sesuai dengan syariah. Prinsip-prinsip seperti keadilan, kehalalan, dan keberlanjutan menjadi landasan dalam setiap kegiatan perdagangan dalam ekonomi Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pendapatan nasional, ekspor, dan impor dipandang dalam perspektif ekonomi Islam. Dengan menyoroti perbedaan utama antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional, penelitian ini berharap dapat memberikan wawasan tentang bagaimana sistem ekonomi Islam dapat diterapkan untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menyoroti pentingnya peran pemerintah dalam memastikan bahwa perdagangan internasional dilakukan dengan cara yang sesuai dengan syariah, sehingga dapat menciptakan perekonomian yang berkeadilan dan berkelanjutan.

TINJAUAN LITERATUR

Ekonomi Islam merupakan disiplin ilmu yang menekankan keseimbangan antara aspek material dan spiritual, serta mengedepankan keadilan, keberlanjutan, dan distribusi kekayaan yang merata. Prinsip-prinsip ini tidak hanya memengaruhi praktik ekonomi pada tingkat individu, tetapi juga mencakup indikator makroekonomi seperti pendapatan nasional, ekspor, dan impor. Ekonomi Islam melihat setiap aktivitas ekonomi tidak hanya dari segi keuntungan finansial, tetapi juga dari dampaknya pada kesejahteraan masyarakat dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah.

1. Pendapatan Nasional dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dalam ekonomi Islam, pendapatan nasional dianggap sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan sosial dan keadilan. Pendapatan nasional harus dikelola dengan memperhatikan distribusi kekayaan yang adil, yang tidak hanya menguntungkan sekelompok kecil masyarakat, tetapi juga memberikan manfaat yang luas bagi semua lapisan. Prinsip keadilan dalam distribusi pendapatan tercermin dalam instrumen seperti zakat, infak, dan sedekah, yang berfungsi sebagai mekanisme untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan membantu mereka yang kurang mampu. Selain itu, dalam ekonomi konvensional, pendapatan nasional diukur dengan PDB atau PNB, yang sering kali hanya berfokus pada pertumbuhan angka-angka ekonomi. Sebaliknya, ekonomi Islam menilai pendapatan nasional berdasarkan sejauh mana pertumbuhan tersebut mendukung kemaslahatan umum dan kesejahteraan masyarakat.

a. Definisi dan Teori Pendapatan Nasional Menurut Para Ahli

i) Adam Smith

Dalam bukunya "The Wealth of Nations," Smith menjelaskan bahwa pendapatan nasional adalah total pendapatan yang diterima oleh warga negara suatu negara, yang terdiri dari pendapatan yang dihasilkan oleh produksi barang dan jasa. Menurut Smith, kunci utama peningkatan pendapatan nasional adalah efisiensi produksi, yang dicapai melalui spesialisasi dan pembagian kerja.

ii) John Maynard Keynes

Keynes, dalam "The General Theory of Employment, Interest, and Money," berpendapat bahwa pendapatan nasional merupakan hasil dari tingkat permintaan agregat dalam perekonomian. Menurutnya, pertumbuhan pendapatan nasional bergantung pada tingkat konsumsi, investasi, dan belanja pemerintah. Dalam pandangan Keynesian, campur tangan pemerintah sangat penting untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.

iii) Paul A. Samuelson

Menurut Samuelson, pendapatan nasional adalah total dari semua barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu negara dalam satu tahun. Samuelson menekankan bahwa pengukuran pendapatan nasional seperti PDB dan PNB adalah ukuran utama kesejahteraan ekonomi, tetapi mereka hanya mewakili aspek material dan tidak memperhitungkan faktor distribusi kekayaan atau kualitas hidup.

iv) Al-Mawardi

Al-Mawardi, seorang ulama dan ekonom klasik dalam Islam, menyatakan bahwa pendapatan nasional bukan hanya hasil dari aktivitas ekonomi, tetapi juga harus digunakan untuk kesejahteraan masyarakat secara adil. Menurut Al-Mawardi, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber seperti zakat, infak, wakaf, dan pajak didistribusikan dengan benar kepada masyarakat yang membutuhkan. Distribusi yang adil bertujuan untuk mencegah akumulasi kekayaan hanya pada sebagian kecil masyarakat dan memastikan bahwa kekayaan beredar luas, memberikan manfaat bagi kesejahteraan bersama.

v) Ibnu Khaldun

Ibn Khaldun, seorang filsuf dan ekonom Islam, menyatakan bahwa pendapatan nasional harus didasarkan pada prinsip keadilan dan keberlanjutan. Dalam pandangannya, keberlanjutan ekonomi dapat dicapai melalui distribusi kekayaan yang merata, di mana setiap individu mendapatkan haknya dalam pemanfaatan sumber daya alam dan kekayaan. Menurut Ibn Khaldun, pendapatan nasional yang hanya berfokus pada akumulasi tanpa keadilan akan menyebabkan ketidakstabilan sosial, dan pemerintah harus mengelola pendapatan tersebut untuk mendukung kemaslahatan umum (*maslahah*) melalui investasi pada sektor-sektor publik yang memberikan manfaat bagi semua, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Dengan demikian, baik teori dalam ekonomi Islam maupun ekonomi konvensional memiliki pandangan yang berbeda mengenai pendapatan nasional. Ekonomi Islam menekankan pada distribusi yang adil dan keberlanjutan, sementara ekonomi konvensional sering kali lebih menitikberatkan pada efisiensi pasar, intervensi pemerintah, dan stabilitas moneter untuk mencapai pertumbuhan pendapatan nasional.

2. Ekspor dalam Perspektif Ekonomi Islam

Ekspor dalam ekonomi Islam tidak hanya dilihat sebagai cara untuk menghasilkan devisa, tetapi juga sebagai media dakwah yang memperkenalkan nilai-nilai Islam, seperti kehalalan dan keadilan, kepada dunia. Produk yang diekspor harus memenuhi standar halal, baik dalam bahan, proses produksi, maupun cara perdagangan yang dilakukan. Prinsip kehalalan, keadilan, dan transparansi sangat penting dalam perdagangan internasional menurut pandangan Islam.

Selain itu, ekspor harus memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi negara asal, dengan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, dan mendorong perkembangan industri lokal. Ekspor yang hanya berorientasi pada keuntungan tanpa mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam yang mengedepankan *maslahah* (kemaslahatan umum).

a. Definisi dan Teori Pendapatan Nasional Menurut Para Ahli

i) Teori Ekspor Menurut Al-Ghazali

Al-Ghazali, seorang pemikir Islam terkenal, menyatakan bahwa kegiatan ekonomi, termasuk ekspor, harus dilakukan dengan tujuan mencapai kesejahteraan bersama dan memperhatikan aspek moral serta etika. Menurutnya, ekspor dalam Islam bukan sekadar kegiatan untuk menghasilkan keuntungan, tetapi juga harus mendukung nilai-nilai Islam, seperti kehalalan, keadilan, dan keseimbangan. Produk yang diekspor harus memenuhi standar halal dan tidak boleh mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam Islam. Al-Ghazali juga menekankan bahwa ekspor harus dilakukan dengan mempertimbangkan dampak sosial, seperti menciptakan peluang kerja dan mendukung ekonomi lokal, serta memperhatikan kesejahteraan konsumen di negara tujuan.

ii) Teori Ekspor Menurut Ibn Taymiyyah

Ibn Taymiyyah berpendapat bahwa perdagangan internasional, termasuk ekspor, harus dilakukan dengan prinsip keadilan dan transparansi. Menurutnya, ekspor seharusnya tidak merugikan produsen atau konsumen, baik di negara asal maupun di negara tujuan. Dalam pandangan Ibn Taymiyyah, pemerintah memiliki peran untuk memastikan bahwa produk yang diekspor memenuhi standar kualitas dan halal, serta mendorong ekspor produk-produk yang bermanfaat secara sosial dan lingkungan. Ia juga menekankan bahwa ekspor yang hanya bertujuan mencari keuntungan tanpa memperhatikan dampak pada masyarakat bertentangan dengan prinsip *maslahah* (kemaslahatan umum) dalam ekonomi Islam.

iii) Teori Keunggulan Komparatif oleh David Ricardo

Teori keunggulan komparatif yang dikemukakan oleh David Ricardo menyatakan bahwa suatu negara harus fokus mengekspor barang atau jasa yang dapat diproduksi dengan biaya relatif lebih rendah dibandingkan negara lain. Menurut Ricardo, perdagangan internasional, termasuk ekspor, memungkinkan negara untuk memperoleh keuntungan dari spesialisasi, meningkatkan efisiensi produksi, dan mengoptimalkan sumber daya. Dalam teori ini, ekspor menjadi cara untuk meningkatkan pendapatan nasional dan kesejahteraan masyarakat dengan memaksimalkan keuntungan dari perdagangan. Teori ini menitikberatkan pada efisiensi dan tidak membahas aspek keadilan atau kesejahteraan sosial dalam proses ekspor.

iv) Teori Heckscher-Ohlin (H-O)

Menurut teori Heckscher-Ohlin, negara akan mengekspor barang yang intensif dalam faktor produksi yang melimpah di negara tersebut. Misalnya, negara yang memiliki tenaga kerja berlimpah akan lebih menguntungkan jika mengekspor barang yang memanfaatkan tenaga kerja intensif. Teori ini berfokus pada bagaimana perbedaan dalam kelimpahan faktor produksi antara negara-negara dapat memengaruhi pola ekspor dan impor mereka. Dalam perspektif ekonomi konvensional, ekspor diharapkan dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan keunggulan relatif faktor produksi tanpa memperhatikan dampak sosial atau moral dari produk yang diekspor.

Dengan demikian, perspektif ekonomi Islam dan konvensional tentang ekspor memiliki pendekatan yang berbeda, di mana ekonomi Islam menekankan pada kemaslahatan umum dan prinsip syariah, sementara ekonomi konvensional lebih menitikberatkan pada efisiensi dan optimalisasi keuntungan.

3. Impor dalam Perspektif Ekonomi Islam

Impor merupakan bagian penting dari aktivitas ekonomi internasional yang memungkinkan negara untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dapat diproduksi secara efisien di dalam negeri. Dalam konteks ekonomi Islam, impor memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar memenuhi kebutuhan pasar atau meningkatkan efisiensi. Ekonomi Islam menekankan bahwa setiap aktivitas perdagangan, termasuk impor, harus selaras dengan prinsip-prinsip syariah, yang mencakup keadilan, kehalalan, serta kemaslahatan umum (maslahah).

Impor dalam ekonomi Islam dipandang sebagai cara untuk memperkuat ketahanan nasional dan memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Hal ini berarti barang yang diimpor harus memenuhi standar halal dan menghindari unsur-unsur yang bertentangan dengan syariah, seperti produk yang mengandung bahan haram atau diproduksi melalui praktik yang merugikan lingkungan atau kesejahteraan pekerja. Selain itu, impor tidak boleh mendorong perilaku konsumtif yang berlebihan atau mengarah pada ketergantungan ekonomi yang dapat melemahkan industri lokal.

Dalam perspektif Islam, pemerintah memiliki peran penting dalam mengatur impor agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk memastikan bahwa barang-barang yang masuk ke pasar domestik mendukung kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dengan mengutamakan keseimbangan antara kebutuhan domestik dan prinsip-prinsip ekonomi Islam, impor dapat menjadi sarana untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan berkeadilan.

4. Teori Impor dalam Perspektif Ekonomi Islam

i) Teori Impor Menurut Al-Mawardi

Al-Mawardi menekankan bahwa impor dalam ekonomi Islam harus bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan harus sesuai dengan prinsip syariah. Impor barang yang tidak tersedia atau tidak dapat diproduksi secara efisien di dalam negeri diperbolehkan, tetapi harus memenuhi standar halal dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Selain itu, impor barang-barang mewah yang berpotensi mendorong perilaku konsumtif dan mengurangi keseimbangan sosial-ekonomi tidak dianjurkan. Al-Mawardi menekankan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengawasi barang-barang yang diimpor dan memastikan bahwa mereka tidak bertentangan dengan nilai moral dan kesejahteraan sosial.

ii) Ibnu Khaldun

Ibn Khaldun, dalam teorinya tentang siklus ekonomi dan pembangunan negara, menyatakan bahwa impor penting untuk mengisi kekosongan yang tidak dapat dipenuhi oleh produksi domestik. Namun, ia memperingatkan bahwa ketergantungan berlebihan pada impor dapat melemahkan

ekonomi lokal dan meningkatkan ketidakstabilan ekonomi. Ibn Khaldun menekankan pentingnya swasembada dan memperkuat industri lokal agar ketergantungan pada impor tidak merugikan ekonomi secara keseluruhan. Menurutnya, pemerintah harus mempertimbangkan manfaat sosial dan dampak jangka panjang sebelum memutuskan untuk mengimpor barang tertentu, serta memprioritaskan produk yang mendorong keberlanjutan ekonomi.

iii) Adam Smith

Adam Smith menyatakan bahwa negara sebaiknya mengimpor barang yang dapat diproduksi oleh negara lain dengan biaya lebih rendah. Menurut teori keunggulan absolut, impor memungkinkan negara untuk memperoleh barang atau jasa yang lebih murah dibandingkan jika diproduksi di dalam negeri, sehingga masyarakat bisa mendapatkan akses terhadap produk dengan harga lebih terjangkau. Dalam pandangan ini, impor adalah alat untuk meningkatkan efisiensi, memanfaatkan keunggulan produksi masing-masing negara, dan memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih optimal tanpa menekankan dampak sosial atau etika dalam aktivitas impor.

iv) Heckscher-Ohlin (H-O)

Teori Heckscher-Ohlin menjelaskan bahwa negara akan mengimpor barang yang intensif dalam faktor produksi yang tidak dimiliki secara melimpah. Misalnya, negara dengan tenaga kerja sedikit dan modal berlimpah akan cenderung mengimpor barang-barang yang memerlukan tenaga kerja banyak. Teori ini berfokus pada pola perdagangan internasional yang didasarkan pada ketersediaan faktor produksi, di mana impor dimaksudkan untuk mengisi kekurangan sumber daya tertentu dalam negeri. Dalam ekonomi konvensional, teori ini menekankan optimalisasi perdagangan untuk mendukung efisiensi produksi tanpa memperhatikan aspek syariah atau kesejahteraan sosial.

5. Implikasi Pemerintah terhadap Ekspor dan Impor dalam Ekonomi Islam

Pemerintah memiliki peran penting dalam mengatur ekspor dan impor untuk memastikan aktivitas perdagangan ini sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Pemerintah dapat menerapkan regulasi untuk memastikan bahwa barang-barang yang diekspor atau diimpor memenuhi standar halal dan tidak melanggar syariah. Misalnya, produk yang mengandung alkohol, daging babi, atau yang menggunakan praktik eksploitasi dilarang dalam ekonomi Islam.

Selain itu, pemerintah perlu mendukung industri lokal agar mampu bersaing di pasar global dan mengurangi ketergantungan pada impor. Kebijakan yang mendukung ekspor produk halal juga penting untuk memperkenalkan produk-produk ini ke pasar internasional, sehingga meningkatkan devisa dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis konsep pendapatan nasional, ekspor, dan impor dalam perspektif ekonomi Islam. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan memahami secara mendalam prinsip-prinsip Islam dalam aktivitas ekonomi, yang mencakup nilai-nilai, etika, serta prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan ekonomi makro. Dalam kajian ini, data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur akademis, termasuk buku, jurnal ilmiah, artikel, serta dokumen lain yang relevan terkait topik penelitian. Sumber data utama meliputi buku klasik dan kontemporer yang mengulas teori ekonomi Islam, seperti karya Al-Mawardi, Ibn Khaldun, Al-Ghazali, dan Ibn Taymiyyah. Selain itu, data juga diambil dari artikel jurnal akademik yang menjelaskan teori ekonomi konvensional tentang pendapatan nasional, ekspor, dan impor, seperti teori Keynesian, Moneteris, keunggulan komparatif, serta teori keseimbangan faktor produksi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pendapatan Nasional dalam Perspektif Ekonomi Islam

Ekonomi Islam menempatkan pendapatan nasional sebagai instrumen utama untuk mencapai kesejahteraan sosial dan keadilan ekonomi. Hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa konsep pendapatan nasional dalam ekonomi Islam tidak hanya berfokus pada akumulasi materi seperti dalam pendekatan konvensional, tetapi lebih menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang adil dan merata. Berdasarkan teori yang disampaikan oleh Al-Mawardi dan Ibn Khaldun, pendapatan nasional dalam ekonomi Islam harus didistribusikan secara adil melalui instrumen-instrumen seperti zakat, infak, dan sedekah. Ini berfungsi sebagai bentuk redistribusi kekayaan yang bertujuan untuk

mengurangi ketimpangan dan memastikan bahwa hasil dari kegiatan ekonomi dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pendekatan ini berbeda dengan teori konvensional, seperti yang disampaikan oleh Keynes dan Friedman, yang menekankan pada pertumbuhan permintaan agregat atau kebijakan moneter untuk meningkatkan pendapatan nasional. Ekonomi konvensional melihat pendapatan nasional sebagai ukuran pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan apakah kekayaan tersebut terdistribusi secara adil. Sebaliknya, ekonomi Islam mengukur keberhasilan ekonomi tidak hanya dari segi peningkatan PDB, tetapi juga dari seberapa jauh pendapatan tersebut digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memenuhi kebutuhan dasar semua anggota masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konsep pendapatan nasional dalam ekonomi Islam menekankan keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, yang berbeda dengan pandangan konvensional yang lebih berfokus pada efisiensi dan pertumbuhan ekonomi.

2. Ekspor dalam Perspektif Ekonomi Islam

Ekspor merupakan salah satu aktivitas penting yang dapat meningkatkan pendapatan nasional, tetapi dalam ekonomi Islam, ekspor memiliki dimensi etika dan spiritual. Hasil kajian menunjukkan bahwa ekspor dalam ekonomi Islam bukan sekadar alat untuk meningkatkan devisa, tetapi juga sebagai media dakwah yang dapat memperkenalkan nilai-nilai Islam, seperti kehalalan, keadilan, dan keberlanjutan, ke pasar global. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Al-Ghazali dan Ibn Taymiyyah, produk yang diekspor harus memenuhi standar halal dan etika yang sesuai dengan syariah. Ekspor barang yang dihasilkan melalui praktik yang adil dan ramah lingkungan dapat berfungsi sebagai cerminan nilai Islam di kancah internasional.

Sebaliknya, dalam ekonomi konvensional, teori keunggulan komparatif dan keseimbangan faktor produksi yang disampaikan oleh Ricardo dan teori Heckscher-Ohlin menekankan efisiensi produksi dan keunggulan dalam perdagangan internasional. Ekonomi konvensional melihat ekspor sebagai cara untuk mencapai efisiensi maksimal dan meningkatkan pendapatan melalui spesialisasi dan pemanfaatan faktor produksi secara optimal, tanpa mempertimbangkan aspek moral atau dampak sosial dari produk yang diekspor. Dari sini, dapat dilihat bahwa ekonomi Islam memiliki pandangan yang lebih holistik terhadap ekspor, di mana nilai-nilai etika, kehalalan, dan kesejahteraan sosial menjadi landasan utama dalam setiap aktivitas perdagangan internasional.

Hasil analisis ini menunjukkan bahwa ekspor dalam perspektif ekonomi Islam lebih kompleks dan terintegrasi dengan tujuan sosial yang lebih luas, sementara pendekatan konvensional lebih berfokus pada keuntungan dan efisiensi pasar.

3. Impor dalam Perspektif Ekonomi Islam

Impor dalam ekonomi Islam dianggap penting untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Hasil yang ditemukan dalam kajian ini menunjukkan bahwa impor dalam ekonomi Islam harus memperhatikan standar halal dan tidak boleh mendorong ketergantungan pada produk luar yang berlebihan. Berdasarkan teori Al-Mawardi, impor hanya dianjurkan jika produk yang dibutuhkan tidak tersedia di dalam negeri dan harus bebas dari unsur yang bertentangan dengan syariah. Ibn Khaldun juga menekankan bahwa ketergantungan berlebihan pada impor dapat melemahkan ekonomi lokal dan menciptakan ketidakseimbangan ekonomi. Oleh karena itu, ekonomi Islam mendorong agar impor dilakukan secara selektif dan memperkuat sektor produksi domestik untuk mengurangi ketergantungan pada produk impor.

Dari sudut pandang ekonomi konvensional, teori keunggulan absolut oleh Adam Smith dan keseimbangan faktor produksi dari teori Heckscher-Ohlin memandang impor sebagai cara untuk meningkatkan efisiensi pasar dan memperoleh barang yang dapat diproduksi dengan lebih murah di negara lain. Impor dianggap sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang tidak tersedia secara efisien di dalam negeri. Ekonomi konvensional cenderung tidak memprioritaskan aspek etika atau dampak sosial dari barang yang diimpor, selama kebutuhan konsumen terpenuhi dan efisiensi produksi terjaga.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam memiliki perspektif lebih luas terhadap impor, yaitu bahwa impor harus mendukung kesejahteraan sosial dan keberlanjutan ekonomi dalam jangka panjang, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan saat ini.

Hasil kajian ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam memiliki pendekatan yang lebih holistik dan berfokus pada kemaslahatan umum dalam mengelola pendapatan nasional, ekspor, dan impor.

Ekonomi Islam memandang bahwa pertumbuhan ekonomi harus didistribusikan secara adil dan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Ekspor dan impor dalam ekonomi Islam diatur berdasarkan prinsip kehalalan, keadilan, dan keberlanjutan, yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan nilai moral.

Sebaliknya, pendekatan ekonomi konvensional lebih berfokus pada efisiensi dan pertumbuhan pendapatan nasional melalui pengoptimalan faktor produksi, perdagangan bebas, dan kebijakan fiskal maupun moneter. Ekonomi konvensional cenderung tidak memberikan perhatian pada aspek moral atau dampak sosial dari aktivitas ekonomi tersebut.

Dengan adanya perspektif ini, diharapkan kajian ini dapat memberikan wawasan mengenai pentingnya implementasi prinsip-prinsip Islam dalam kegiatan ekonomi, khususnya dalam konteks pendapatan nasional, ekspor, dan impor, guna mencapai kesejahteraan yang lebih merata dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa ekonomi Islam memiliki pendekatan yang holistik dan etis dalam mengelola pendapatan nasional, ekspor, dan impor. Dalam perspektif Islam, pendapatan nasional bukan hanya angka atau ukuran pertumbuhan ekonomi, tetapi juga alat untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan bersama. Konsep ini mengutamakan distribusi kekayaan yang adil, yang didukung oleh instrumen seperti zakat, infak, dan sedekah untuk mengurangi ketimpangan ekonomi. Pendapatan nasional dalam ekonomi Islam harus tidak hanya mencerminkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kesejahteraan yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Ekspor dalam ekonomi Islam dianggap sebagai media untuk memperkenalkan nilai-nilai Islam ke pasar global, di mana produk yang diekspor harus halal, berkualitas, dan tidak melanggar etika atau merugikan masyarakat. Selain itu, ekspor yang dilakukan juga diharapkan dapat menciptakan manfaat yang lebih besar bagi perekonomian domestik, seperti penciptaan lapangan kerja dan pengembangan industri lokal. Sementara itu, impor dalam perspektif Islam sebaiknya hanya dilakukan untuk kebutuhan mendasar yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa barang-barang impor memenuhi standar halal dan tidak mengganggu keseimbangan ekonomi domestik atau mendorong budaya konsumtif.

Dibandingkan dengan ekonomi konvensional, yang berfokus pada efisiensi, pertumbuhan, dan optimalisasi pasar, ekonomi Islam menekankan keseimbangan antara tujuan ekonomi dan prinsip moral, dengan perhatian pada kemaslahatan umum, keadilan, serta keberlanjutan. Ekonomi Islam menawarkan pendekatan yang dapat menjadi solusi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan adil, dengan memastikan bahwa setiap aktivitas ekonomi berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, konsep ekonomi Islam dalam pendapatan nasional, ekspor, dan impor tidak hanya relevan bagi umat Islam tetapi juga menawarkan alternatif yang berpotensi memperkaya praktik ekonomi global yang lebih etis dan inklusif.

REFERENSI

- Ahmad, Nurul & Hassan, Rahmat. (2020). *Islamic Banking: Theory and Practice*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Ali, Syed S. & Mollah, Mohammad N. (2022). The Role of Islamic Banking in Promoting Economic Growth in Indonesia. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 3(1), 45-60.
- Azhari, Mulyadi & Nugroho, Yusuf. (2021). Perbandingan Kinerja Bank Syariah dan Bank Konvensional di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 12(2), 137-150.
- Basir, Ahmad & Asyraf, Wan. (2023). Financial Inclusion and the Role of Islamic Banks in Supporting SMEs. *Journal of Islamic Banking and Finance*, 11(1), 72-85.
- Basyir, Abdullah. (2020). *Bank Syariah di Indonesia: Sejarah dan Perkembangan*. Jakarta: Lembaga Pengkajian dan Penerapan Ekonomi Syariah.
- Dar, Humayon A. & Presley, John R. (2020). Islamic Banking: Theoretical Foundations and Contemporary Issues. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(3), 404-417.
- Dusuki, Asyraf W. (2021). The Role of Islamic Banks in Economic Development: A Case Study of Malaysia. *Asian Economic Policy Review*, 16(1), 123-139.
- Fadhli, Muhammad. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Bank Syariah dan Bank Konvensional di

- Indonesia. *Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis*, 15(2), 189-205.
- Hassan, M. Kabir & Lewis, Mervyn K. (2020). *Handbook of Islamic Banking*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
- Ibrahim, Arif. (2022). The Impact of Islamic Banking on Economic Growth in Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3(1), 23-40.
- Iqbal, Zamir & Mirakhor, Abbas. (2020). *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*. Hoboken: Wiley.
- Kamarulzaman, Nor Hidayah & Ali, Aminuddin. (2022). Financing SMEs through Islamic Banks: An Analysis of the Challenges. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 15(2), 179-197.
- Khan, M. Shahid & Bhatti, Irum. (2021). Islamic Banking and Financial Stability: A Comparative Analysis. *Global Journal of Business Research*, 15(1), 1-15.
- Lubis, Muhamad Husni. (2023). The Role of Islamic Finance in Supporting Sustainable Development Goals. *Sustainability*, 15(4), 2543.
- Maulidia, Siti. (2022). The Potential of Islamic Banking to Finance the Real Sector in Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen*, 10(1), 56-73.
- Rahman, Ahmad. (2021). Understanding the Differences between Islamic and Conventional Banking Systems. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 2(1), 14-27.
- Setiawan, Andi & Nasution, Agus. (2020). Islamic Banking and Its Impact on Economic Growth: Evidence from Indonesia. *Journal of Islamic Banking and Finance*, 10(2), 112-129.